

KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Di Indonesia. Kekerasan seksual tergolong dalam kategori kejahatan paling serius. Maraknya kekerasan seksual di Indonesia membuat pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menanggulangi kasus yang menelan banyak korban tersebut. Demi mewujudkan tegaknya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati demikian, Undang-Undang tersebut ternyata masih belum bisa menjadi payung hukum yang bekerja secara optimal. Adanya reviktimisasi terhadap korban, sulitnya korban mendapatkan pendampingan, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan rasa keadilan pada korban pun turut memperburuk keadaan. Rasa kepercayaan korban kepada pemerintah maupun sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi sumber pelindung mereka juga menjadi berkurang. Pada akhirnya, ketidakefektifan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana formulasi hukum kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan kekerasan seksual yang optimal pada korban. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur formulasi hukum yang sangat kompleks dan komprehensif terutama penanganan terhadap korban. Pemerintah pun saat ini sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat berkinerja dengan optimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perencanaan Pembangunan Hukum

**CRIMINAL POLICY ON SEXUAL VIOLENCE IN LEGAL DEVELOPMENT
PLANNING IN INDONESIA**

ABSTRACT

This research is entitled Criminal Policy on Sexual Violence in Legal Development Planning in Indonesia. Sexual violence is classified as the most serious crime category. The rise of sexual violence in Indonesia has made the government pay full attention to dealing with cases that claim many victims. In order to realize legal protection for victims of sexual violence, the government has promulgated Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. However, it turns out that this law still cannot become a legal umbrella that works optimally. The revictimization of victims, the difficulty of victims getting assistance, and the imposition of sentences on perpetrators of sexual violence that still do not provide a sense of justice to victims also make the situation worse. Victims' sense of trust in the government and the criminal justice system in Indonesia, which is their source of protection, has also decreased. In the end, the non-optimality of the Sexual Violence Crime Law becomes a question about how the sexual violence law is formulated as regulated in Law Number 12 of 2022 and how the government will try to plan legal development to provide optimal sexual violence protection for victims. This research using normative juridical methods draws the conclusion that the Sexual Violence Crime Law regulates very complex and comprehensive legal formulations, especially the handling of victims. The government is currently drafting implementing regulations for the Sexual Violence Crime Law so that it can perform optimally in protecting victims of sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, TPKS Law, Legal Development Planning*